

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENGHINAAN PRESIDEN
DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh :

PUTRI BALQIS SYAIFUDIN

NIM. C94219101



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Balqis Syaifudin
NIM : C94219101
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP
PENGHINAAN PRESIDEN DALAM UU
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Gresik, 05 November 2023
Saya yang menyatakan,


Putri Balqis Syaifudin
NIM. C94219101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Balqis Syaifudin
NIM. : C94219101
Judul : Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penghinaan Presiden
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 Oktober 2023
Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

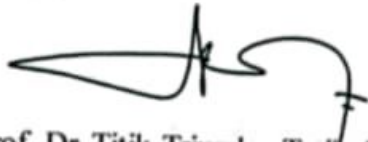
Nama : Putri Balqis Syaifudin

NIM. : C94219101

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 13 November 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



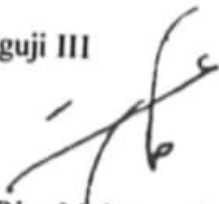
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji II



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 13 November 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sudiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Balqis Syaifudin
NIM : C94219101
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : putry.qiqis@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENGHINAAN PRESIDEN
DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 November 2023
Penulis

(Putri Balqis Syaifudin)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penghinaan Presiden Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yakni tentang bagaimana analisis pasal-pasal penghinaan presiden dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 serta menjawab rumusan masalah kedua yakni tentang bagaimana analisis *fiqh siyāsah* pasal-pasal penghinaan presiden dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Skripsi ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), yang mana hasil penelitian di dapat dari berbagai sumber buku dan jurnal maupun artikel yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak dari penghinaan adalah penurunan harkat dan martabat individu, yang merupakan hak dasar setiap manusia. Oleh karena itu, perlakuan yang adil dan menghormati hak asasi manusia seharusnya diberikan kepada semua orang, termasuk terhadap kepala negara dan warga sipil. Kemudian berdasarkan tinjauan *fiqh siyāsah*, sebagai bentuk taat atas pemimpin maka sebagai warga negara haruslah taat, mencintai dan mendo'akan kebaikan untuk pemimpin tersebut. seorang pemimpin harus bisa diterima (*acceptable*), mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menjabarkan terkait pentingnya untuk memastikan bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap kepala negara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERLINDUNGAN TERHADAP KEPALA NEGARA DALAM KONSTITUSI DAN ISLAM.....	17
2.1 Kepala Negara atau Presiden dan Wakil Presiden	17
2.2 Presiden Sebagai Kepala Negara.....	19
2.3 Presiden sebagai Kepala Pemerintahan	20
2.4 Tugas dan wewenang Presiden.....	21

2.5	Perlindungan Kepala Negara Dalam Konsep Konstitusi.....	25
BAB III PENGATURAN PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023		41
3.1	Latar belakang pengaturan pasal tentang penghinaan presiden	41
3.2	Rumusan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam UU Nomor 1 Tahun 2023	43
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023		55
4.1	Analisis pasal penghinaan presiden dalam UU Nomor 1 Tahun 2023	55
4.2	Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023	58
BAB V PENUTUP.....		61
a.	Kesimpulan.....	61
b.	Saran.....	61

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah. 2000.

Al-Maudidi, Abul 'Ala. *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan. 1995.

Arifin, Zaenal. "Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: KENCANA, 2017.

Ismail R. Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi. 1998. *Atlas Budaya Islam (Menjelajah Khaanah Peradaban Gemilang)*, terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan.

Jailani, Imam Amrusi, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.

Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1983.

Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Pekan Baru: Nusa Media. 2013.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*, Revisi, Jakarta: Kencana, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Asad. *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka. 1985.

Musa, Muhammad Yusuf. *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. Kairo: Dar alKitab al-„Arabi, t.t.

Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.

Pulungan, J. Suyuthi. 1994. *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Jakarra: PT. RajaGrafindo Persada.

Rammelingk, Jan. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Wijanarko, Dwi Seni, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Raja Grafiis Persada, 2021.

E-book dan Jurnal

A. S. L, Bangsawan. Kajian kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden. *Jurnal Refleksi Hukum* 4(1), 2019.

Aushaf, Anggun Rafiqa. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi no. 91/PUUXVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah, (Salatiga, 17 Juni 2022), 14. Accessed september 9, 2022. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14263/>

Ellandra, Athallah Zahran. Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton). *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2022.

Fuad Masykur. Syariah, Fiqh dan Siyashah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi dan Aplikasi. *Jurnal Syar'ie* Volume 6 Nomor 1, Februari 2023.

Jaenudin, “Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam”, ‘Adliya, Vol.9 No.2, (Edisi:Juli-Desember 2015):136.accesed Desember 10,2023. <https://etheses.uinsgd.ac.id/4446/2/007.%20Jaenudin%20-%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Kepala%20Negara%202015.pdf>

Kementrian Hukum dan HAM. Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab. accessed July 6, 2023. <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bahas-rkuhppasal-penghinaan-presiden-dan-wakil-presiden-di-dpr-menkumhamsinggung-batas-masyarakat-beradab>

Khasanah, Ummul. "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi", Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014.

Kliwantoro. RUU KUHP. <https://www.antaranews.com/berita/2211826/dibalikpentingnya-pasal-penghinaan-terhadap-presiden>. Antara News. Accessed July 6. 2023.

Mujahidin, Akhmad. "Islam dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin Muslim)," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2016). Accessed October 7, 2023. [https://www.uinsuska.ac.id/blog/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatanuntuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmadmujahidin/#:~:text=\(HR%20Muslim\),.fitnah%2C%20sebagaimana%20Firman%20Allah%20SWT](https://www.uinsuska.ac.id/blog/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatanuntuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmadmujahidin/#:~:text=(HR%20Muslim),.fitnah%2C%20sebagaimana%20Firman%20Allah%20SWT)

M. Nggilu, Novendri. Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi "Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.

Nurfaizi, Septiana Rizco. "Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam," DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 18, no. 2 (Desember, 2020):233-247. Accessed Juny 15, 2023, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/1409/777/>

Prabowo, Prasetyo Hadi. "Analisis Yuridis Penghinaan Kepala Negara Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 1, Januari 2023. Accessed October 16, 2023. <https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/56/53>

Prayitno, Cipto. Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020.

Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. "Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP", Jurnal Pandecta 15, No. 2 (December, 2020): 212. Accessed october 16, 2023. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>

Purba, Jonatan. "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berpotensi Mengancam Hak Kebebasan Berpendapat Diakitkan Dengan Asas *Lex Certa* Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berkaitan", Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018.

Rahman, Z. *Wacana pasal penghinaan presiden atau wakil presiden dalam RUU KUHP*. Jurnal RechtsVinding Online. 4(2). 2015.

Rahmasari, Nuzul Shinta Nur, Hari Soeskandi. "Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Journal article: Mimbar Keadilan. <https://neliti.com/publications/516521/penghidupan-kembali-pasal-terhadap-penghinaan-presiden-dan-wakil-presiden-dalam>. accessed October 10, 2023

Samsu, La. *Al-sulṭah al-tasyri'iyah, Al-sulṭah al-tanfiẓiyyah, Al-sulṭah al-qaḍā'iyah*, Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017.

Septiana, "Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam," *Diktum: jurnal syariah dan hukum* 18, no. 2 (Desember, 2022): 241. accessed June 27, 2023. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/1409/777/>.

Syaputra, Deny. "Kewenangan Presiden, Dpr Dan Dpd Dalam Pembentukan Undang-undang Di Republik Indonesia," *MENARA Ilmu* XII, no. 4 (2018). accessed September 29, 2023. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/731>

Simajuntak, Supriardoyo. *Reformulasi Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dalam Rkuhp Sebagai Jalan Tengah Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Lex Jurnalica Volume 19 Nomor 1, April 2022.

Wardani, Ivana Eka Kusuma. "Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP Ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia" (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021)

Wiranti, Andini. "Pro Kontra Pasal Penghinaan Presiden Di RKUHP Dan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Patriot: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum* 15, no. 1 (Juni 1, 2022): 7-8. accessed June 10, 2023. <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/86>.

Yenuardiansyah, Muhammad Alfahrizzy. "Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Demokrasi", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Website

<https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-delik-aduan-dan-delik-biasa>
accessed November 19, 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/18461691/seputar-pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp-yang-dipastikan-tak-akan-dihapus> accessed September 29, 2023.

<https://nasional.tempo.co/read/1595079/soal-pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp-ini-kata-wamenkumham> accessed September 29, 2023.

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62c183ae9c227/constitutional-disobedience-pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp> accessed September 29, 2023.

Privacy Policy,” Google Privacy Center, accessed February 10, 2023, <https://kbbi.web.id/formulasi>.

“Privacy Policy,” Google Privacy Center, accessed September 29, 2023, <http://repository.uinbanten.ac.id/4723/6/BAB%20IV.pdf>.

“Privacy Policy,” Google Privacy Center, accessed February 10, 2023, http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Pidana_125448_unukaltim_p2k-unkris.html#Pasal-Pasal_KUHP_yang_Populer.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Al-Qur'an

Al-Qur'an, Al-Anbiya': 73.

Al-Qur'an Ali I'mron : 103.

Al-Qur'an Al-Ma'idah : 2.

Al-Qur'an An-Nisa': 59.